



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG

AGENDA KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 41);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem, dipandang perlu menyusun Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1404/04-A/HK/2014 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Masa Bhakti 2014-2019;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

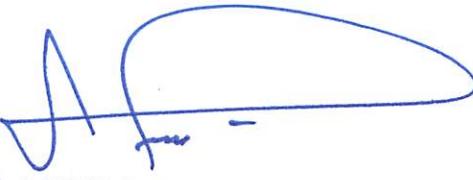
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Agenda Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Agenda Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibagi dalam Tiga Masa Persidangan.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan Agenda Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam pelaksanaannya didampingi oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Sekretariat, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 6 Desember 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
KETUA,



I NENGAH SUMARDI

WAKIL KETUA,



I MADE WIRTA

WAKIL KETUA,



I NYOMAN KARYA KARTIKA

WAKIL KETUA,



IDA BAGUS ADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Karangasem di Amlapura.
4. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karangasem.
6. A r s i p.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
AGENDA KEGIATAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
ANGGARAN 2018

RENCANA AGENDA KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

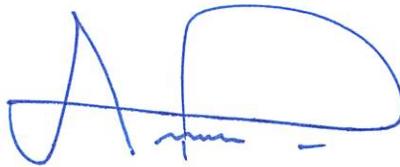
No.	Bulan	Rencana Kegiatan	Keterangan.
<b>MASA PERSIDANGAN II</b>			
1.	Januari	1. <b>Peringatan Tahun Baru Masehi 2018.</b> 2. Rapat Alat Kelengkapan DPRD. 3. Pembahasan Rancangan Perda. 4. Konsultasi. 5. <b>Peringatan Hari Raya Siwa Ratri.</b> 6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 7. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD. 8. Kunjungan Kerja.	
2.	Pebruari	1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD. 2. Pembahasan Rancangan Perda. 3. Konsultasi. 4. <b>Peringatan Tahun Baru Imlek 2569.</b> 5. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD. 6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 7. Reses Masa Persidangan II. 8. Kunjungan Kerja.	
3.	Maret	1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD. 2. Pembahasan Rancangan Perda. 3. Kunjungan Kerja. 4. Paripurna Pokok-pokok Pikiran DPRD. 5. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD. 6. <b>Peringatan Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1940 dan Hari Raya Saraswati.</b> 7. LKPJ. TA. 2017 Masuk ke Sekretariat DPRD. 8. Konsultasi. 9. <b>Peringatan Hari Raya Pagarwesi.</b> 10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 11. <b>Peringatan Hari Wafatnya Yesus Kristus.</b> 12. Bimbingan Teknis	

4.	April	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>2. Pembahasan LKPJ TA. 2017.</li> <li>3. Pemberian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati TA. 2017.</li> <li>4. Kunjungan Kerja.</li> <li>5. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>6. Konsultasi.</li> <li>7. <b>Peringatan Hari Wafatnya Isa Almasih.</b></li> <li>8. <b>Peringatan Hari Raya Isra Mi'Raj.</b></li> <li>9. Pengawasan/Monitoring kegiatan Triwulan I.</li> <li>10. Rapat Dengar Pendapat.</li> <li>11. Pembahasan Rancangan Perda.</li> <li>12. Hering/Rapat Dengar Pendapat.</li> <li>13. Bimbingan Teknis.</li> <li>14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> </ol>	
		<b>MASA PERSIDANGAN III</b>	
5.	Mei	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peringatan Hari Buruh Internasional.</b></li> <li>2. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>3. Kunjungan Kerja.</li> <li>4. <b>Peringatan Hari Raya Kenaikan Isa Almasih.</b></li> <li>5. Pembahasan Rancangan Perda.</li> <li>6. Konsultasi.</li> <li>7. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> <li>9. Bimbingan Teknis.</li> <li>10. <b>Peringatan Hari Raya Waisak 2562.</b></li> <li>11. <b>Peringatan Hari Raya Galungan.</b></li> </ol>	
6.	Juni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peringatan Hari lahirnya Pancasila.</b></li> <li>2. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>3. <b>Peringatan Hari Raya Kuningan.</b></li> <li>4. Pembahasan Rancangan Perda.</li> <li>5. Konsultasi.</li> <li>6. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>7. <b>Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.</b></li> <li>8. KUA dan PPAS TA.2019 masuk ke Sekretariat DPRD.</li> <li>9. Kunjungan Kerja.</li> <li>10. Menyusun Agenda Kegiatan DPRD Th.2019.</li> <li>11. Bimbingan Teknis.</li> <li>12. Membahas KUA dan PPAS TA. 2019 oleh BANGGAR.</li> <li>13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> </ol>	
7.	Juli.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan LHP BPK dalam Rapat Paripurna.</li> <li>2. Bupati menyampaikan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan.</li> <li>3. Kunjungan Kerja.</li> <li>4. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2019.</li> <li>5. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>6. Pembahasan Rancangan Perda.</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Bimbingan Teknis.</li> <li>8. Konsultasi.</li> <li>9. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> <li>11. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.</li> <li>12. Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.</li> <li>13. Pengawasan/Monitoring kegiatan Triwulan II.</li> </ul>	
8.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>2. KUPA dan PPAS-P masuk Setwan.</li> <li>3. Pembahasan KUPA dan PPAS-P. TA. 2018.</li> <li>4. Kunjungan Kerja.</li> <li>5. <b>Peringatan HUT RI.</b></li> <li>6. Menyusun Program Pembentukan Perda TA. 2019.</li> <li>7. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>8. Konsultasi.</li> <li>9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> <li>10. <b>Peringatan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah.</b></li> <li>11. Bimbingan Teknis.</li> <li>12. Reses Masa Persidangan ke III.</li> </ul>	
		<b>MASA PERSIDANGAN I</b>	
9.	September	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>2. Pengawasan/Monitoring kegiatan Triwulan II.</li> <li>3. <b>Peringatan Tahun Baru Hijriyah.</b></li> <li>4. Ranperda Perubahan APBD TA. 2018 masuk Setwan.</li> <li>5. Konsultasi.</li> <li>6. Pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2018.</li> <li>7. Kunjungan Kerja.</li> <li>8. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2018.</li> </ul>	
10.	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>2. Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD TA. 2019.</li> <li>3. Kunjungan Kerja.</li> <li>4. <b>Peringatan Hari Raya Saraswati.</b></li> <li>5. <b>Peringatan Hari Raya Pagarwesi.</b></li> <li>6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</li> <li>7. Pembahasan RAPBD TA. 2019.</li> <li>8. Bimbingan Teknis.</li> <li>9. Pembahasan Rancangan Perda.</li> <li>10. Konsultasi.</li> <li>11. Pengawasan/Monitoring Kegiatan Triwulan III.</li> </ul>	
11.	Nopember	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD.</li> <li>2. Pembahasan RAPBD TA. 2019.</li> <li>3. Kunjungan Kerja.</li> <li>4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang APBD TA. 2019.</li> <li>5. Bimbingan Teknis.</li> </ul>	

		6. <b>Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW.</b> 7. Pembahasan Rancangan Perda. 8. Konsultasi. 9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 10. Reses Masa Persidangan I	
12.	Desember	1. Rapat Alat Kelengkapan DPRD. 2. Pembahasan Rancangan Perda. 3. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD. 4. Konsultasi. 5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 6. <b>Peringatan Hari Raya Natal.</b> 7. Kunjungan Kerja. 8. <b>Peringatan Hari Raya Galungan.</b> 9. Monitoring/Pengawasan Kegiatan Triwulan IV.	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
KETUA,



I NENGAH SUMARDI.

WAKIL KETUA,



I MADE WIRTA.

WAKIL KETUA,



I NYOMAN KARYA KARTIKA.

WAKIL KETUA,



IDA BAGUS ADNYANA.

Catatan :

1. Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah Rencana Kerja dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan saat itu.
2. Jadwal kegiatan dan rapat-rapat disetiap masa persidangan ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.